

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ialah sebuah lembaga keuangan non bank yang dasar hukumnya berbeda dengan bank. Badan perkreditan desa adalah Peraturan Daerah Bali (PERDA) No. 2, 1998, bank menggunakan nomor resmi. 1992 tentang perbankan sebagai landasan hukum 7. Keberadaan lender desa pertama kali dimulai berdasarkan statuta gubernur nomor. Itu digantikan oleh 972 pada tahun 1984 dan kemudian oleh Peraturan No. 11 oleh Gubernur Bali tahun 2013. Bank desa berperan sebagai tempat mengelola kekayaan desa berupa uang dan surat serta menjalankan fungsinya. meningkatkan taraf hidup, adat istiadat dan kegiatan desa lainnya. Sebagian besar usahanya adalah untuk mendukung pembangunan desa. Di sini, peran pemberi pinjaman desa sangat penting dalam upayanya untuk mencapai pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencapai kehidupan masyarakat yang mandiri dan mencapai pengembangan usaha, usaha mikro di pedesaan.

Lembaga Perkreditan Desa adalah organisasi yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh Desa Pakraman dengan tujuan untuk memajukan pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui penyaluran simpan pinjam yang terarah. Itu hanya memenuhi kebutuhan anggota masyarakat desa. Sebagai lembaga keuangan mikro yang telah berkembang pesat di Bali, terutama pada jumlah Lembaga Perkreditan Desa di Bali yang terdapat 1.433 Lembaga Perkreditan Desa dengan total asset sebesar Rp 21 triliun yang sudah melampaui batas. Lembaga Perkreditan

Desa di Bali tidak hanya memiliki aset yang begitu besar disamping itu Lembaga Perkreditan Desa di Bali telah mengalami kondisi yang tidak diinginkan seperti ditemukan kondisi Lembaga Perkreditan Desa yang tidak sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan macet, lebih parah nya ada Lembaga Perkreditan Desa yang tidak beroperasi.

Laporan keuangan adalah semua metode yang digunakan oleh bisnis untuk menyampaikan informasi keuangan. Dengan kata lain, ruang lingkup laporan keuangan (financial statement) lebih luas dari pada laporan keuangan (financial statement), yang merupakan notabena informasi keuangan suatu organisasi untuk suatu jangka waktu yang bisa dipakai melukiskan operasi suatu bisnis. Laporan keuangan ini merupakan salah satu dari tahap pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kemajuan dari sebuah Lembaga Perkreditan Desa karena proses pelaporan pendanaan yang tepat akan menghasilkan laporan keuangan yang bermutu, semakin baik pelaporan keuangan yang dihasilkan di dalam sebuah organisasi maka semakin besar kemungkinan pengambilan keputusan yang tepat. Namun pada kenyataanya masih banyak Lembaga Perkreditan Desa yang menganggap remeh proses pelaporan keuangan sehingga tidak sedikit Lembaga Perkreditan Desa yang sering mengalami masalah dalam proses pelaporan keuangan, seperti yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa Sekecamatan Kubu yang memiliki banyak masalah dalam proses pelaporan keuangan sehingga banyak Lembaga Perkreditan Desa yang mengalami kerugian dan menyebabkan Lembaga Perkreditan Desa tersebut macet dan bahkan ada yang tidak bisa beroperasi lagi. Seperti kasus yang terjadi di Desa Adat Kayuaya dimana ketidaktepatan waktu penyusunan pelaporan keuangan menyebabkan mangkraknya

pembangunan pura dalem, hal tersebut bisa terjadi karena pelaporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa Adat Kayuaya tidak diselsaikan dengan tepat waktu sehinhingga menyebabkan bendesa adat mengambil keputusan yang salah dalam menentukan anggaran. Selain itu juga terdapat kasus di Lembaga Perkreditan Desa Adat Tunas Sari dalam hal ini ketua Lembaga Perkreditan Desa Adat Tunas Sari ini telah tersangka menyalahgunakan kredit nasabah sebesar 30 juta. Kasus ini dilihat saat tersangka telah memanipulasi data pelaporan keuangan sehingga terdapat selisih antara saldo peminjam atas pelaporan yang dibuat Lembaga Perkreditan Desa Adat Tunas Sari dengan saldo pinjaman yang diberikan menurut hasil pinjaman. Kasus ini terjadi karena tidak transparannya proses pelaporan keuangan yang dibuat dan kurang baiknya pengendalian internal yang ada didalam Lembaga Perkreditan Desa Adat Tunas Sari.

Adanya kondisi-kondisi tersebut dikarenakan dalam pengembangan Lembaga Perkreditan Desa dikecamatan Kubu yang tidak luput dari permasalahan diantaranya yaitu, kesenjangan tingkat pertumbuhan Lembaga Perkreditan Desa yang meningkat dengan total asset Lembaga Perkreditan Desa yang relative kecil, adanya Lembaga Perkreditan Desa yang belum memenuhi perbandingan cukup modal dan pelampauan batas maksimal pengeluaran kredit, adanya Lembaga Perkreditan Desa yang tidak menggunakan sistem informasi akuntansi dalam menunjang aktivitasnya, kurang diterapkannya pengendalian internal, sumber daya manusianya yang kurang berkualitas dan penyampaian pelaporan yang tidak tepat waktu yang akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Lembaga Perkreditan Desa setempat. Idealitas menjamin bahwa ringkasan anggaran diperkenalkan pada rentang yang tepat, dengan mempertimbangkan perubahan

organisasi yang dapat mempengaruhi pengguna informasi saat membuat prakiraan dan membuat keputusan. Pengguna laporan keuangan mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis berbagai jenis informasi yang terkandung dalam informasi keuangan. Namun terdapat beberapa organisasi publik yang ditemukan pelaporan keuangan tidak tepat waktu, salah satunya pada Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Karangasem, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Perbandingan Keterlambatan Pelaporan Keuangan pada
Kabupaten Karangasem

Nama Kecamatan	Jumlah Desa Adat	Jumlah LPD yang Terlambat dalam menyampaikan Pelaporan Keuangan	Nama Desa
Kecamatan Abang	14	3	Desa Bunutan Desa Datah Desa Kerta Mandala
Kecamatan Sidemen	10	2	Desa Telaga Desa Sangkan
Kecamatan Bebandem	8	3	Desa Jungutan Desa Bungaya Kangin Desa Bhuana Giri
Kecamatan Kubu	29	10	Desa Pakraman Kayuaya Desa Pakraman Nusu Desa Pakraman Bantas Desa Pakraman Baturinggit Desa Pakraman Eka Adnyana Desa Pakraman Tunas Sari Desa Pakraman Temakung Desa Pakraman Belong Desa Pakraman Karanganyar Desa Pakraman Juntal Kaja

Sumber: Data Penelitian (2021)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas tersaji di Kecamatan Kubu merupakan kecamatan dengan jumlah keterlambatan penyusunan pelaporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yaitu 10 pelaporan keuangan. Ketepatan waktu laporan keuangan ialah salah satu karakter kualitatif yang wajib terpenuhi oleh laporan keuangan agar sejalan bagi pengambil keputusan. Laporan keuangan yang tidak disampaikan pada waktunya menurunkan nilai informasi yang terkandung dalam laporan pendanaan dan mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Beberapa unsur yang berperan dalam mempengaruhi sifat pengumuman keuangan LPD yang tergambar dalam penelitian ini, faktor utama yang mempengaruhi sifat rincian keuangan pada LPD Kecamatan Kubu adalah kerangka data pembukuan yang digunakan.. Terdapat banyak Lembaga Perkreditan Desa yang berada di Kecamatan Kubu yang menggunakan sistem informasi akuntansi yang sangat sederhana dan belum memenuhi standar Akuntansi keuangan daerah, hal ini menyebabkan pelaporan hasil keuangan yang dihasilkan juga tidak dapat diandalkan dan kurang relevan dengan pengambilan keputusan.

Sistem informasi akuntansi dibentuk oleh suatu perkumpulan atau lembaga dan bisa menjalankan fungsinya. Artinya, layak untuk menyampaikan data pembukuan yang berkesinambungan, dapat diandalkan, setara dan lugas bagi para pimpinan. Kapasitas untuk mengawasi data secara layak di pemerintahan sangat penting mengingat fakta bahwa hal itu dapat membentuk premis administrasi yang baik. Kerangka kerja data pembukuan adalah berbagai aset, misalnya, individu dan peralatan yang digunakan untuk mengerjakan informasi sebagai data (Bodnard dan Hopwood 2000:4). Menurut Permendagri Nomor 59 yang diselenggarakan di

Anisma tahun 2007, Kenndy dan Rahayu (2019) menyebutkan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan rangkaian tahapan yang dimulai dari proses pendataan, registrasi, tabulasi dan pembiayaan. Dalam laporan, Anda dapat melakukan pertanggungjawaban dengan cara mandiri atau dengan menggunakan system komputerisasi sebagai bagian dari pelaksanaan APBD Anda. Namun karena keterbatasan SDM dan spesialisasi akuntansi khususnya akuntansi keuangan di pelayanan umum, sebaiknya menggunakan sistem komputerisasi yang lengkap dan teruji. Hal tersebut bisa meminimalisir kesalahan proses akuntansi dan mengembangkan mutu laporan yang dihasilkan. (Fajar, 2011;3).

Selain itu yang yang berpengaruh terhadap mutu pelaporan keuangan adalah pengendalian internal. Pengendalian internal di Lembaga Perkreditan Desa dikecamatan Kubu bisa dikatakan masih sangat kurang, ini disebabkan karena masih banyaknya di dalam organisasi Lembaga Perkreditan Desa yang hanya memberatkan orang tertentu dalam menyusun laporan keuangan, kurang adil dalam pembagian tugas, dan kurang tegasnya peraturan yang ada dalam Lembaga Perkreditan Desa. Hal ini tentu akan mempengaruhi pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh Lembaga Perkreditan Desa karena tentunya pegawai yg menyusun pelaporan keuangan pasti akan merasa tertekan dalam menyelesaikan pelaporan keuangan sehingga menghasilkan pelaporan keuangan yg kurang akurat dan akan menyebabkan terlambatnya penyusunan pelaporan keuangan. Sistem manajemen dan pengendalian internal diterapkan secara berkesinambungan dan optimal oleh seluruh karyawan, memberikan keyakinan yang cukup untuk mencapai pelaksanaan yang efisien dan efektif, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan hukum dan peraturan yang mengarah pada laporan yang berkualitas.

Pengendalian internal bisnis komersial, bukan komersial, mutlak penting karena operasi dan kerja perlu aturan khusus yang dapat mengatur dan menetapkan cakupan dan peraturan khusus untuk setiap kinerja kegiatan organisasi. Pengendalian internal diperlukan untuk membantu Anda dengan mudah menemukan dan menganalisis masalah yang ada dan potensi masalah dalam proses pencapaian tujuan Anda sehingga Anda dapat melihat dengan jelas pencapaian tujuan Anda. Pemerintah masih menghadapi tantangan yang kompleks dalam meningkatkan kinerjanya. Menurut (PP Nomor 60 Tahun 2008; Bodnar dan Hoopwod, 2015;298) Sistem pengendalian internal adalah sistem yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan kendala pelaporan keuangan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah, melindungi aset negara, dan mematuhi hukum. Pengendalian intern dibagi menjadi lima komponen, antara lain: a) Lingkungan manajemen b) Penilaian risiko c) Kegiatan manajemen d) Informasi dan komunikasi dan e) Pemantauan.

Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap mutu pelaporan keuangan adalah kemampuan sumber daya manusia. Kapasitas sumber daya manusia merupakan suatu factor penting dalam menciptakan informasi keuangan agar tercipta informasi keuangan yang bernilai dan bermutu sehingga digunakan oleh pengguna sistem keuangan. Informasi ekonomi. Namun sumber daya manusia yang dimiliki Lembaga Perkreditan Desa yang berada di Kecamatan Kubu masih tergolong sangat kurang, hal ini dikarenakan banyaknya pegawai Lembaga Perkreditan Desa yang memiliki latar belakang pendidikan yang kurang relevan dan masih banyak Lembaga Perkreditan Desa yang memperkerjakan pegawai dibagian penyusunan pelaporan keuangan yang tidak mengetahui dasar - dasar

penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar sehingga dalam penyusunan laporan keuangan pegawai tersebut hanya mengikuti laporan keuangan yang telah ada sebelumnya tanpa mempertimbangkan apakah pelaporan keuangan tersebut sudah sesuai atau belum, ini tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan,, proses pembuatan informasi keuangan adalah proses terpenting dari suatu lembaga untuk mengetahui kinerja dan keberadaannya selama periode waktu tertentu, sehingga jika tidak didukung, didukung oleh keterampilan, penerapan akuntan. Penerapan prinsip akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern belum efektif. Tidak mungkin membuat laporan keuangan yang berisi informasi berkualitas yang dapat dikelola secara efektif dan dapat diakses oleh pengguna. Menurut Roviyantje (2011). Laporan keuangan adalah produk yang harus dihasilkan oleh bidang akuntansi atau prinsipal. Oleh karena itu, diperlukan tenaga yang berkualitas yang bisa mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Demikian pula instansi pemerintah membutuhkan orang yang memahami dan bersaing dengan akuntansi pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang bermutu.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Rohmah, Askandar Dan Sari (2020) Hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat secara bersamaan. Hasil uji parsial memperlihatkan terdapat tiga variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pemahaman tentang bagaimana standar akuntansi pemerintahan ($\text{sig} = 0,002$), penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah ($\text{sig} = 0,031$), dan sistem pengendalian intern ($\text{sig} = 0,000$) mempengaruhi mutu laporan keuangan.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Udiyanti, Atmadja dan Darmawan (2014). Hasil survei menunjukkan bahwa 1) standar akuntansi pemerintah berdampak positif signifikan terhadap kualitas informasi keuangan dan 2) sistem pengendalian intern berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas informasi keuangan. Informasi keuangan, 3) Kapasitas sumber daya manusia berdampak positif dan penting terhadap kualitas informasi keuangan, 4) Prinsip akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern dan kompetensi akuntansi berdampak positif dan signifikan terhadap mutu informasi keuangan daerah.

Penelitian ini adalah pengembangan dari model survei Sukmaningrum dan Harto (2016). Perbedaan dari survei Sukmaningrum dan Harto (2016) ialah survei ini menambahkan variabel independen yaitu sistem informasi akuntansi. Penambahan variabel ini dikarenakan berkembangnya teknologi informasi saat ini dan pelaporan keuangan daerah harus menggunakan teknologi informasi ini. Namun, karena kurangnya sistem dan sumber daya manusia, penggunaan yang optimal seringkali tidak memungkinkan dan perlu dipertimbangkan apakah daerah tersebut telah memperkenalkan sistem informasi akuntansi yang memadai.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sumber Daya manusia Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa Sekecamatan Kubu”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Penjelasan dasar di atas menunjukkan bahwa terdapat masalah ketidakbenaran dalam menyajikan laporan keuangan. Masalah yang diidentifikasi adalah:

1. Ketidaktepatan waktu untuk menyampaikan pelaporan keuangan
2. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas
3. Lemahnya pengendalian internal
4. Terjadinya manipulasi data keuangan pada saat penyusunan pelaporan keuangan
5. Penyusunan pelaporan keuangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah dicantumkan untuk menghindari bias dan memperluas topik, untuk membuat pencarian lebih fokus, dan untuk memfasilitasi diskusi untuk mencapai tujuan pencarian. Ruang lingkupnya hanya mencakup informasi tentang dampak sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan keterampilan bakat pada kualitas informasi keuangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa Sekecamatan Kubu?

2. Apakah terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa Sekecamatan Kubu?
3. Apakah terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa Sekecamatan Kubu?
4. Apakah terdapat pengaruh sistem informasi akuntansi, pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa Sekecamatan Kubu?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat dampak sistem informasi akuntansi terhadap mutu pelaporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa Sekecamatan Kubu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat dampak pengendalian internal terhadap mutu pelaporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa Sekecamatan Kubu.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat dampak kompetensi sumber daya manusia terhadap mutu pelaporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa Sekecamatan Kubu.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat dampak sistem informasi akuntansi, pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap mutu pelaporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa Sekecamatan Kubu.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan, wawasan dan informasi tentang sistem informasi akuntansi, pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terkait mutu pelaporan keuangan pada lembaga perkreditan desa di kecamatan Kubu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

penelitian ini perlu memperkuat pengalaman implementasi, pengetahuan dan pemahaman tentang dampak sistem informasi akuntansi, pengendalian internal dan kapasitas sumber daya manusia terhadap mutu pelaporan keuangan terutama pada Lembaga Perkreditan Desa Sekecamatan kubu.

b. Bagi Pengelolaan lembaga perkreditan di desa-desa di kecamatan Kubu

Hasil survei ini perlu menjadi pertimbangan dalam pengelolaan lembaga perkreditan di desa-desa di kabupaten Kube guna meningkatkan mutu pelaporan keuangan.

c. Bagi Peneliti Lain/Pembaca

Hasil penelitian ini bagi peneliti di bidang akuntansi sebagai dokumen untuk menyelidiki topik penelitian, persamaan dan dokumen dalam pengembangan penelitian tingkat yang lebih tinggi.